TAHUN

2021

DINAS PERHUBUNGAN

www.dishub.tanjabbarkab.go.id

(0742) 7351069

PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2021 ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penyusunan LKIP merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan laporan tahunan yang dibuat setiap akhir tahun dan sebagai bahan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif iii

Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Gambaran Pelayanan SKPD 3
1.3.1 Visi Misi dan OPD 4
1.3.2 Strategi dan Kebijakan Struktur 4
1.3.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9
1.4 Sumber Daya SKPD 20
1.5 Analisis SWOT 24
1.6 Sistematika Pelaporan 26

Bab II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis 29
2.1.1 Relevansi RPJMD dan Sasaran OPD 30
2.1.2 Strategi dan Kebijakan OPD 38
2.1.3 Tujuan dan Sasaran OPD 40
2.2 Perjanjian Kinerja 43

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan 2020 48
1. Sasaran Strategis 1
Meningkatnya (PAD) pada sector transportasi darat, laut, sungai, danau dan penyeberangan …….. 49
2. Sasaran Strategis 2
Menurunnya tingkat kecelakaan darat dan laut…….....50
3. Sasaran Strategis 3
Meningkatnya tertib laik angkutan jalan kendaraan angkutan umum.....51
3.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah 53
a. Pendapatan Daerah 53
b. Pengelolaan Belanja Daerah..... 54
c. Permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah 57

Bab IV PENUTUP 62
DAFTAR TABEL
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021..... 20

Tabel 1.2 Aset pendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada dinas perhubungan 21

Tabel 2.1 Visi & Misi RPJMD 30

Tabel 2.2 Matriks Relevansi Renstra Dinas Perhubungan Terhadap Visi & Misi RPJMD 31

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja terhadap kondisi akhir renstra 41

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 44

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 dan perbandingan tahun 2020..... 48

Tabel 3.2 Realisasi Program, Kegiatan, Anggaran dan Capaian Tahun 2021

Dinas perhubungan kab. Tanjung jabung barat 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 63 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas perhubungan, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya memenuhi tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Perhubungan ditahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perhubungan terus berusaha memperbaiki sistem penataan transportasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Transportasi sendiri merupakan faktor utama yang menjadi sarana penghubung untuk mendukung berkembangnya kemajuan ekonomi, sosial dan demokrasi.

Berdasarkan uraian table, dapat disimpulakan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana dengan sangat baik dan sangat efisien.

Permasalahan yang mempengaruhi tercapainya target IKU Dinas Perhubungan akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, yaitu masih terdapat backlog antara target dan capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan, misalnya perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran per kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan perwujudan visi Bupati pada sektor transportasi maupun dukungan menajemen tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk meminimalisir permasalahan di masa mendatang, Dinas Perhubungan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Menyusun dokumen perencanaan yang selaras;
3. Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
4. Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat outcome sampai dengan level Eselon II, dan selaras antara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;
6. Setiap unit Eselon II dan III aktif dalam melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun kelengkapan data, baik yang bersifat manual maupun online sehingga unit kerja di bawahnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama;
7. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkesinambungan yang dilakukan setiap Triwulan guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* oleh karena itu agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. *Good governance* yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas,profesional serta etos kerja dan moral tinggi . Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Pertanggung jawaban tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan

memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Baratr adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah selaku penyelenggara negara, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di daerah yang berisi tentang informasi keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasin Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 12).

1.3 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Semangat reformasi menghendaki adanya penataan kembali sistem pemerintah baik dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah, baik di lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Masyarakat menghendaki adanya Penyelenggaraan Pemerintah yang lebih efektif, efisien, demokrasi, transparan, dan reponsif. Untuk menjawab tantangan diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan sebagian kewenangan dan tugas didasarkan pada Visi dan Misi yang ada pada Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 :

1.3.1 VISI MISI DAN TUJUAN OPD

Visi :

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sejalan dengan Visi Bupati Tanjung Jabung Barat, Visi Dinas Perhubungan adalah :

"Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat".

Misi :

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/ produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas

1.3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan

keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.

4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatkan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelencaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.

5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut:

Bidang Perhubungan Darat.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik dipedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan luar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.
- Pengembangan dan peningkatan kinerja fasilitas angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- Peningkatan pengawasan,pengendalian dan penertiban angkutan barang di jalan melalui optimalisasi pengoperasian jembatan timbang dan pembangunan jembatan timbang baru yang respresentatif dan memenuhi standar.
- Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.
- Mengoptimalka Forum LLAJ dan optimalisasi peran dalam rangka mewujudkan system transportasi yang ideal.

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

- Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Kuala Tungkal untuk melayani arus bongkar/muat dan ekspor/impor, sehingga memenuhi persyaratan sebagai outlet.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian, melalui rehabilitasi dermaga sungai, pemasangan rambu sungai dan pembangunan fasilitas keselamatan sarana dan prasarana guna menunjang keselamatan pelayaran.
- Peningkatan maupun kuntitas sarana, prasarana dan operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas
- Pengembangan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan sebagai angkutan antar pulau dalam rangka mendukung program pembangunan Kota Kuala Tungkal sebagai salah satu pintu gerbang Provinsi Jambi.
- Fasilitas upaya pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan – pelabuhan dalam rangka antisipasi terhadap tuntutan kerjasama
- kualitas regional dan era globalisasi.
- Fasilitas peningkatan kualitas dan kuantitas sarana bantu navigasi sebagai prasarana terpenuhinya standar keselamatan pelayaran.
- Koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- Fasilitasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- Penataan dan relokasi pelabuhan.
- Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut, sungai dan penyeberangan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing – masing.

GAMBAR 1

1.3.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Perhubungan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan disebut pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagaian kewenangan Kabupaten dibidang Perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas dilingkungan dinas;
   b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas;
   c. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan, Melaksanaan pembinaan dan pengawasan unit pelayanaan teknis dinas;
   d. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengn instansi terkait dalam pelaksanaannya.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat mengacu Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63); terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
   - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
   - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat;
   - Seksi Lalu Lintas Jalan dan Angkutan;
   - Seksi Sarana dan Prasarana;
   - Seksi Operasional dan Keselamatan;
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- Seksi Keselamatan Pelayaran;
- Seksi Angkutan Kepelabuhan;
- Seksi Sarana dan Prasarana;

5. Kelompok Jabatan Fungsional;

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutase, prmosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi penglolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengeloalaan adan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntasi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;
g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perncanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
b. Melkaukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pernyusunan program dan anggaran;
c. Melakukakn penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;

e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesai dengan tugasnya.

4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan rosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fugsi :

a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkretaapian.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transporatasi darat serta perkeretaapian;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana,prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan,keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpenyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana,sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatantransportasi darat serta perkeretaapian;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTDlingkup perhubungan darat; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkaitdengan tugas dan fungsinya.

5) **Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat**

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis,menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan,pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana danprasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapankelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;
e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6) **Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan

angkutan, pemantuan, evaluasi da pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan danpelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang padaa jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;
g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugasnya.

7) **Seksi Operasi dan Keselamatan**

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian,

rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

8) BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi da pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai da penyeberangan dalam kabupaten;
c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkai dengan tugas dan fungsinya.

9) **Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan**

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasaan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan nya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapka rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;

d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
e. melakukan koordinasi, pemeliharan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;
f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusuna laporan kegiatan seksi; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;
c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekpedisi, angkutan sungai;
k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkat dengan tugasnya.

11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.4 SUMBER DAYA SKPD

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.

a. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	3	3	-
	- Eselon IV	9	8	1
	-Non Eselon	16	13	3
	Jumlah	**29**	**25**	**4**
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
	- SMA	12	11	1
	- D II	1	1	0
	- D III	2	1	1
	- D IV	0	0	0

	- S.1 - S.2 **Jumlah**	10 2 **29**	8 2 **25**	2 0 **4**
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status : - PNS - Kontrak	 29 90	 25 81	 4 9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur : - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV	 0 1 3	 0 1 3	 0 0 0

b. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun asset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	**Prasarana**		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	1 unit	
	e. Pelabuhan Sungai Ka. Tungkal	1 unit	
	f. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	

	g. Pelabuhan Penyeberangan RORO Ka. Tungkal	1 unit	
	h. Pos pengawasan di dermaga		
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	1 unit	
	i. Halte sungai	15 unit	
2.	**Sarana**		
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	1 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	2 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	3 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	21 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)	2 unit	
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	

	h. Traffic light i. Guadrail j. Median k.Rambu sungai l. ZOOS	2 unit 1 paket 1 paket	

c. Kinerja Pelayanan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maka infrastruktur sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Adapun prasarana yang ada di Dinas Perhubungan antara lain :

Prasarana pendukung operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

Bidang Perhubungan Darat

a. Terminal Pembengis
b. Terminal Kota
c. Hanggar Bongkar Muat
d. Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan :

a. Gedung Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
b. Gedung Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
c. Pos Pengawasan di setiap dermaga yaitu :

- Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
- Dermaga Tangga Raja Ulu
- Dermaga Ampera

- Dermaga Pasar Kuatik

1.5 TANTANGAN, POTENSI, DAN PERMASALAHAN SKPD (analisis SWOT)

Urusan Perhubungan

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga

masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.

d. THREATS (ANCAMAN):

1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi

e. ISU – ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Eksternal:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan;
3. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
4. Belum optimalnya angkutan umum masssal dan angkutan umum;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

Internal:

1. Nilai evaluasi kinerja yang belum memadai;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinejra organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisais kinerja tahun ini dnegan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan data peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. **Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Perencaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan peruba

han lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memaduserasikan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan kinerja Kementerian Perhubungan disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021 tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja Eselon I sampai unit kerja Eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian Perhubungan Tahun 2021.

2.1.1 RELEVANSI RPJMD DAN SASARAN OPD

Tabel 2.1

Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	"MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" *(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)*
Misi RPJMD :	
Misi 1	: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	: 2. Cipta kondisi sosial yang tentram,tertib, dan harmonis
Misi 3	: 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	: 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
MISI 5	5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dan sasaran 5.1.2 yaitu Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.

TABEL 2.2
MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD : "MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" *(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)*

MISI RPJMD

- **Misi 5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota**

Sasaran 5.1.2 : Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.

Tabel
Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2021-2026
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	1.1.1. Persentase Jaringan lalu Lintas angkutan jalan	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2 Persentase Jaringan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
		1.1.3 Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (98%)	1.350 Unit (98%)
		1.1.4 Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

2.1.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatkan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelencaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 2.3:**

Tabel

Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2021-2026

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	1.1.1. Persentase Jaringan lalu Lintas angkutan jalan	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2 Persentase Jaringan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
		1.1.3 Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (98%)	1.350 Unit (98%)
		1.1.4 Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LAKIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada **Table 2.4.**

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1. .	Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Dokumen Halte Sungai Yang Tersedia	2 Dokumen	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	60 Kasus	Kepala Bidang Darat, Kasi Operasional dan Keselamatan
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Kasus	Kepala Bidang Laut, Kasi Keselamatan Pelayaran
		Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan di Kab/kota	50 Unit	Kepala Bidang Darat, Kasi Sarana dan Prasrana
		Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1150 UNIT	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

a. PROGRAM DAN Sub KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam periode Renstra 2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 3 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renja Perubahan 2021 adalah sebagai berikut:

Program Prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2021

PROGRAM		ANGGARAN
1. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	2.334.040.000
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	1.462.865.000
JUMLAH	**Rp.**	**3.796.905.000**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

   Sub kegiatan :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Indikator : Jumlah Tersedianya Dokumen Perencanaan

   b. Pengamanan Barang Milik Daerah

      Indikator : Jumlah Dokumen Pemeliharaan prasarana perkantoran

   c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

      Indikator : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

   d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

      Indikator : Jumlah Paket Kompone Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan

   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

f. Penyediaan Bahan Cetaakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratura Perundang-Undangan yang Disediakan

h. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasui SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

j. Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan dan Pengendlian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan

Indikator : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian dan Pengawasan Jalan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api

Indikaator : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau

c. Pengoperasian dan Pemeliharan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara

b. **KELOMPOK SASARAN KEGIATAN**

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;

2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

"Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus":

"Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus" :

% Pencapaian Rencana - (Realisasi-Rencana)

Rencana Tingkat Capaian = x 100% Rencana

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan kinerja ini adalah dengan rumus pencapaian realisai pelaksanaan indikator kinerja utama sasaran dibagi dengan target yang ingin dicapai sebelumnya pada indikator kinerja utama (IKU) sasaran tersebut. Indikator kinerja yang menjadi acuan pada penilakai LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Realisas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
Dan Perbandingan dengan tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Target 2021			Sumber Data	KET
				2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %		
				Rp	Rp	6	7	8		
	Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Dokumen Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah dokumen perencanaan halte sungai yang tersusun	0%	100%	2 Dok	8 Dok	100%	Dishub	
2		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	20	60	20	72	27%	SatLantas, Dishub	
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	1 kasus	80%	Dishub	
3		Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Sudah Diuji x 100% / Jumlah Kendaraan yang wajib uji	1347 Unit	251 Unit	1150 Unit	0 Unit	0,00%	UPT Pengujian Kendaran Bermotor	

Pengukuran dan Analisis Kinerja :

1. **Indikator 1 : Jumlah dokumen halte sungai yang tersedia**

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivtas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa mauoun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka **diatas** 100% atau realisasi 4 Dokumen halte sungai yang sudah tersusun dengan target 2 Dokumen .pada tahun 2021 pencapaian target sudah **sangat baik**. Perbandingan atara realisasi di tahun 2020 **100%** dan realisasi di tahun 2021 **>100%.**

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan halte sungai.
- Perlu menyusun proposal maupun dokumen pembangunan halte sungai,

❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan penyusunan dokumen halte sungai agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan seperti halte sungai.
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. **Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat**

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan.

Pada indicator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka 34% atau realisasi 65 Kasus dengan target 20 kasus. pada tahun 2021 pencapaian target terbilang **buruk** karena semakin tinggi angka kecelakaan lalu lintas bertolak belakang dengan tolak ukur sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbandingan atara realisasi di tahun 2020 **60 Kasus** dan realisasi di tahun 2021 **65 Kasus.**

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
  - Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu linta, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
  - Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.
- **Solusi**
  - Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
  - Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
  - Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
  - Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

3. **Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan.**

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jasa transportasi laut, sungai danau dan penyeberangan.

Pada indikator ini pencapaian kinerja tahun 2021 mencapai predikat **baik,** karena jumlah kasus angka kecelakaan Jumlah kasus kecelakaan pada bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan adalah 1 kasus dengan target prediksi 3 kasus. Perbandingan antara kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2020 **0 kasus** dan 2021 **2 kasus** terdapat peningkatan karena meurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan laut**.**

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
  - Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti rambu laut dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi laut sungai dan penyeberangan. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas laut.
  - Kekurangan yang sangat siginifikan juga menjadi penyebab seperti personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analis sistem informasi dan programmer.
  - Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.
- **Solusi**
  - Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
  - Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
  - Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas laut

- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

4. Indikator 1 : persentase kendaraan yang laik jalan.

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2021 mencapai predikat **sangat tidak baik.** Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 0 unit dengan target di tahun 2021 adalah 1150 unit dengan realisasi capaian (**0%).** Dan realisasi capaian di tahun 2020 adalah (**20%)** Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2019 dan tahun 2020 menurun sebesar **(- 100%).** Terhitung pada bulan februari tahun 2020 Kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup karena kekurangan salah satu alat uji yaitu **Brake Tester**, sehingga menjadi tidak memenuhi standar akreditasi laik operasional pengujian kendaraan bermotor.

Permasalahan dan Solusi

❖ **Permasalah :**

- Pada bulan februari tahun 2020 gedung Pengujian Kendaraan Bermotor resmi di tutup dikarenakan tidak dapat memenuhi Standar Akreditasi sehingga tidak mendapatkan izin legalitas operasional sehingga tidak dapat memenuhi target capaian. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah

menganggarkan pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor melalui APBD Perubahan Tahun 2021.

- Kekurangan alokasi anggaran.
- Kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum untuk mengurus perpanjangan Izin Trayek dan Kartu Pengawas angkutan karena banyaknya kendaraan angkutan yang tidak laik jalan dan tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan pengusaha ataupun pemilik kendaraan yang tidak mau mengurus perpanjangan masa berlaku izinnya.
- Masih kurangnya fasilitas perhubungan yaitu alat uji pengujian kendaraan bermotor yang merupakan kunci utama untuk memberikan pelayana prima dan sesuai standar.
- Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi.

❖ Solusi

- Segera melakukan penyesuaian akreditasi pada UPKB agar dapat beroperasional.
- Penegakan hukum dan melaksanakan operasi razia rutin bekerja sama dengan satlantas dan PM untuk menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin laik jalan.
- Menjalin korelasi dengan pihak ketiga sebagai pengguna jasa transportasi untuk melakukan uji laik kendaraan secara berkala. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh baik untuk peningkatan PAD pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus.
- Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya uji laik kendaraan secara berkala.

1.2 Realisasi Angaran dan Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Tabel 3.2 Target dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi tahun 2021	
			Keuangan	Capaian (%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir	Rp. 200.000.000	Rp. 56.522.000	28,26 %
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 0	Rp. 0	0
3.	Retribusi Kepelabuhan	Rp. 204.000.000	Rp. 319.924.200	156,83 %
4.	Retribusi Terminal	Rp. 90.000.000	Rp. 91.578.000	101,75 %

Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan Pada Retribusi Parkir :
  a. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum perdesaan untuk mengurus perpanjangan Izin Trayek dan Kartu Pengawas angkutan perdesaannya karena banyaknya kendaraan angkutan perdesaan yang tidak laik jalan dan tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan pengusaha ataupun pemilik kendaraan yang tidak mau mengurus perpanjangan masa berlaku izinnya.
  b. Belum Tersedianya UPTD Pengelola Parkir
  c. Belum adanya acuan dan standar dalam penegakan hukum di bidang perhubungan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan (Transportasi).
- Solusi :

a. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap layanan angkutan
b. Membentuk UPTD Pakir
c. Membuatkan Perda sebagai dasar melakukan penegakan aturan dengan mempedomani Perda Bidang Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d. Menurunkan target PAD

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Target dan Realisasi

a) Belanja Tidak Langsung

- Alokasi Anggaran : Rp. 4.897.794.361
- Realisasi Anggaran : Rp. 4.751.252.019
- Sisa Lebih Anggaran : Rp. 146.542.342

b) Belanja Langsung

- Alokasi Anggaran : Rp.
- Realisasi Anggaran : Rp.
- Sisa Lebih Anggaran : Rp.

Tabel 3.3 Realisasi Program, Kegiatan Anggaran dan Capaian Kinerja (%)

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	%	%
Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 33.772.363**	**Rp 27.772.361**	99%	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Rp 33.772.363	Rp 27.772.361	99%	98%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Rp 3.014.193.200**	**Rp 3.014.193.200**	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Rp 2.870.223.200	Rp 2.870.223.200	99%	99%
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp 143.970.000	Rp 143.970.000	99%	99%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Rp 42.000.000**	**Rp 37.632.220**	83%	83%

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya prasarana transportasi	Rp 42.000.000	Rp 37.632.220	83%	83%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Rp 48.000.000**	**Rp 47.982.000**	99%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegav	Rp 48.000.000	Rp 47.982.000	99%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Rp 376.946.450**	**Rp 361.834.068**	99%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Rp 8.635.558	Rp 8.629.364	99%	100%
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	Rp 41.551.142	Rp 40.694.234	97%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	Rp 38.570.000	Rp 24.570.000	63%	63%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 19.879.750	Rp 19.879.750	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100%	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	Rp 262.310.000	Rp 262.060.720	99%	99%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Rp 99.540.848**	**Rp 92.655.708**	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Rp 1.190.000	Rp 1.190.000	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	Rp 69.800.000	Rp 63.410.493	91%	91%
Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Rp 28.550.848	Rp 28.055.215	98%	98%
Pemeloharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Rp 503.495.700**	**Rp 458.396.717**	95%	95%
Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Meningkat	Rp 410.885.500	Rp 366.160.672	89%	89%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	Rp 25.310.200	Rp 25.088.045	99%	95%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Rp 67.300.000	Rp 67.148.000	99%	95%

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		**Rp 2.334.040.000**	**Rp 2.271.599.990**	100%	100%
Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan		**Rp 2.334.040.000**	**Rp 2.271.599.990**	100%	100%
Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Rp 2.208.480.000	Rp 2.166.442.990	98%	100%
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		**Rp 125.560.000**	**Rp 105.157.000**	**84%**	**84%**
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Rp 125.560.000	Rp 105.157.000	84%	84%

	Program Pengelolaan Pelayaran					
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota		**Rp 1.462.865.000**	**Rp 1.453.379.000**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	Rp 553.980.000	Rp 546.920.000	99%	99%
	Pelaksanan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Tersedianya dokumen halte sungai	Rp 400.000.000	Rp 398.112.000	99%	99%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Halte Sungai dalam kondisi baik	Rp 508.885.000	Rp 508.347.000	99%	99%

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.897,794,361,-** Realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.751,252,019,-** atau **98%** dan realisasi fisik **95%**. dengan melaksanakan **3 Program** dan **22 SubKegiatan**.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulakan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana dengan sangat baik dan sangat efisien.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI CPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

- **PERMASALAHAN**

1. **Kompleksnya Persoalan Transportasi**

   Persoalan klasik transportasi yang sering dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung barat seperti halnya yang di hadapi kabupaten lain kemacetan pada ruas jalan tertentu, kecelakaan lalu lintas serta polusi udara. Penyebab persoalan tersebut antara lain pertumbuhan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang jauh melampaui tingkat pertumbuhan kapasitas jalan, kurangnya kesadaran/disiplin pengguna jalan untu tertib lalu lintas, dan kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Persoalan tersebut juga dinilai berdampak pada nilai ekonomi dan social.

2. **Trayek dan distrbusi angkutan umum belum optimal**

   Dinas perhubungan kabupaten tanjung jabung barat bekerja sama dengan pihak ketiga telah mendistribusikan angkutan umum untuk mengangkut peumpang dari kota kuala tungkal menju ke kecamatan senyerang. Penyediaan layanan dan pengembangan trayek tersebut diniai masih kurang dan perlu

dilakukan reorganisasi trayek angktan kabupaten untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. **Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan**

   Marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu instrument menuju keselamatan lalu lintas (traffic safety), ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas. Keterbatasan ini semata disebabkan oleh kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padang yang masih belum memadai untuk memenuhinya.

4. **Gedung PKB tidak bisa beroperasi Karena Tidak Memenuhi Standar Akreditasi Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor.**

5. **Kurangnya Partisipasi warga kabupaten**

   Ketertiban dan keselamatan lalulintas di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku manusia, termasuk di dalamnya sopir angkutan umum. Selain dituntut untuk mengetahui dan memahami aturan lalulintas, para pengguna jalan juga dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku dengan penuh disiplin. Fakta yang ada belum seluruh pengguna jalan bisa berlaku disiplin di jalan raya sebagaimana mestinya. Disamping itu, penggunaan fasilitas transportasi untuk kepentingan lain menyebabkan kapasitas ideal fasilitas tersebut menjadi terganggu disamping juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Masalah klasik yang sering dihadapi beralih fungsinya trotoar dan badan jalan menjadi fungsi lain sehingga fasilitas transportasi tidak dapat digunakan secara optimal. Dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak dapat mengatasi persoalan tersebut secara mandiri karena menyangkut tugas pokok/kewenangan unit kerja lain dan tuntutan pihak-pihak tertentu.

6. **Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas**

Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi. Kekurangan yang sangat siginifikan adalah personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analis sistem informasi dan programmer. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya hasil pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjawab tantangan persoalan transportasi dan teknologi informasi di lapangan yang semakin dinamis.

7. **Minimnya fasilitas pelabuhan penyeberangan RORO**

   Penyempurnaan penyediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan roro sangat perlu di tingkatkan untuk kenyamanan dan keamanan penumpang. Pelabuhan penyeberangan roro menyediakan trayek Kuala Tungkal – Dabo Singkep, Kuala Tungkal Tungkal – Dabo Singkep – Batam, Kuala Tungkal – Batam.

- <u>Solusi</u>

1. **Melakukan penyesuaian terhadap target serta mengoptimalisasikan pengawasan terhadap PAD**

   Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pencapaian retribusi seperti retribusi perparkiran di tepi jalan umum yang membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran dan tidak tersedianya UPTD Parkir. Untuk itu perlu dilakukan penganggaran dalam mendukung kegiatan ini dan membentuk UPTD Parkir. Selain itu perlu adanya penyesuaian target realisasi PAD terkait dengan kondisi saat ini. Selanjutnya perlu adanya penindakan tegas terhadap pelanggaran atau pungutan parkir liar dan perlu sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan berkelanjutan.

2. **Melakukan kajian dan koordinasi dengan stakeholder**

Forum Lalu Lintas merupakan wadah kerjasama dan koordinasi untuk mencari solusi mengatasi permasalahan transportasi yang makin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan secara mandiri. Diharapkan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) ini dapat dicarikan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Selain forum lalu lintas, koordinasi dan konsultasi juga giat dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kementerian Perhubungan.

3. **Implementasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas**
   Untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jalan terutama pada peakhourpagi dan sore/malam hari, berbagai teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas telah dilakukan diantaranya pemberlakuan sistem satu arah dan larangan parkir. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya traffic jam dan mempertahankan waktu tempuh ideal pada ruas-ruas jalan utama dalam kota. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak ikutan yang muncul terhadap lalu lintas pada kawasan sekitarnya akibat pembangunan pusat-pusat kegiatan seperti mall dan hotel, maka Analisis Dampak Lalu Lintas menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi pengembang sebelum IMB diberikan oleh pihak terkait.
4. **Kajian kinerja jaringan trayek dan distribusi kebutuhan angkutan umum**
   Membentuk jaringan trayek yang optimal dan distribusi armada angkutan umum yang ideal. Penentuan lokasi terminal disesuaikan rencana tata ruang kota yang mendukung adanya pemecahan tujuan perjalanan dari satu CBD ke beberapa sub CBD.
5. **Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dari APBN**
   Salah satu upaya menyiasati minimnya kemampuan keuangan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan adalah dengan bantuan dana APBN dan dana APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mensinergikan renstra Kabupaten Tanjung Jabung Barat urusan Perhubungan dengan renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Pemerintah Propinsi.

6. **Penegakan hukum**

Operasi penertiban dalam rangka penegakan hukum tetap dilakukan untuk menjaga konsistensi dan wibawa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang lalu lintas. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dan kontinyu dengan institusi lain yang terkait agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

7. **Pengembangan SDM**

   Untuk meningkatkan kuantitas personil, Dishub berupaya melakukan penambahan personil melalui pemenerimaan penempatan personil dari SKPD lain melalui BKPSDM dan juga mengusulkan penambahan tenaga kontra. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas personil ditempuh dengan mengirimkan ke diklat teknis perhubungan. Selain itu juga telah dilakukan MOU dengan Pihak STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dalam hal rekruitman personil yang berkompeten di bidang perhubungan.

8. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Roro Kuala Tungkal**

   Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana di Pelabuhan Penyeberang RORO dengan menggunakan dana APBN yang dikelola oleh Balai Transportasi Darat dan Rehabilitas Melalui dana APBD.

9. **Penyediaan Sarana dan Prasana Pendukung PKB Untuk Memenuhi Standar Akreditsi Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor**

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 sangat baik baik, dikarenakan terdapat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat melampaui beberapa target dalam Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020, sehingga terlihat nilai manfaat dari pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan dirasakan masyarakat. Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
Dan Perbandingan dengan tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Target 2021			Sumber Data	KET
				2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %		
				Rp	Rp	6	7	8		
	Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Dokumen Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah dokumen perencanaan halte sungai yang tersusun	0%	100%	2 Dok	8 Dok	100%	Dishub	
2		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	20	60	20	72	27%	SatLantas, Dishub	
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Total Kasus Kecelakaan Darat Tahun Berjalan	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	1 kasus	80%	Dishub	
3		Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Sudah Diuji x 100% / Jumlah Kendaraan yang wajib uji	1347 Unit	251 Unit	1150 Unit	0 Unit	0,00%	UPT Pengujian Kendaran Bermotor	

Pengukuran dan Analisis Kinerja :

1. **Indikator 1 : Jumlah dokumen halte sungai yang tersedia**

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi, dan juga

sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivtas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa mauoun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka **diatas** 100% atau realisasi 4 Dokumen halte sungai yang sudah tersusun dengan target 2 Dokumen .pada tahun 2021 pencapaian target sudah **sangat baik**. Perbandingan atara realisasi di tahun 2020 **100%** dan realisasi di tahun 2021 **>100%.**

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan halte sungai.
- Perlu menyusun proposal maupun dokumen pembangunan halte sungai,

❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan penyusunan dokumen halte sungai agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan seperti halte sungai.
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan.

Pada indicator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka 34% atau realisasi 65 Kasus dengan target 20 kasus.

pada tahun 2021 pencapaian target terbilang **buruk** karena semakin tinggi angka kecelakaan lalu lintas bertolak belakang dengan tolak ukur sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbandingan atara realisasi di tahun 2020 **60 Kasus** dan realisasi di tahun 2021 **65 Kasus.**

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
  - Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu linta, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
  - Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.
- **Solusi**
  - Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
  - Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
  - Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
  - Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

3. **Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan.**

   Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jasa transportasi laut, sungai danau dan penyeberangan.

Pada indikator ini pencapaian kinerja tahun 2021 mencapai predikat **baik,** karena jumlah kasus angka kecelakaan Jumlah kasus kecelakaan pada bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan adalah 1 kasus dengan target prediksi 3 kasus. Perbandingan antara kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2020 **0 kasus** dan 2021 **2 kasus** terdapat peningkatan karena meurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan laut**.**

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
  - Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti rambu laut dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi laut sungai dan penyeberangan. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas laut.
  - Kekurangan yang sangat siginifikan juga menjadi penyebab seperti personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analis sistem informasi dan programmer.
  - Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.
- **Solusi**
  - Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
  - Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
  - Penagakan hokum dan melakukan operasi tertib lalu lintas laut
  - Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

4. Indikator 1 : persentase kendaraan yang laik jalan.

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2021 mencapai predikat **sangat tidak baik.** Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 0 unit dengan target di tahun 2021 adalah 1150 unit dengan realisasi capaian (**0%).** Dan realisasi capaian di tahun 2020 adalah (**20%)** Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2019 dan tahun 2020 menurun sebesar **(- 100%).** Terhitung pada bulan februari tahun 2020 Kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup karena kekurangan salah satu alat uji yaitu **Brake Tester**, sehingga menjadi tidak memenuhi standar akreditasi laik operasional pengujian kendaraan bermotor.

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalah :**
  - Pada bulan februari tahun 2020 gedung Pengujian Kendaraan Bermotor resmi di tutup dikarenakan tidak dapat memenuhi Standar Akreditasi sehingga tidak mendapatkan izin legalitas operasional sehingga tidak dapat memenuhi target capaian. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menganggarkan pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor melalui APBD Perubahan Tahun 2021.
  - Kekurangan alokasi anggaran.

- Kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum untuk mengurus perpanjangan Izin Trayek dan Kartu Pengawas angkutan karena banyaknya kendaraan angkutan yang tidak laik jalan dan tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan pengusaha ataupun pemilik kendaraan yang tidak mau mengurus perpanjangan masa berlaku izinnya.
- Masih kurangnya fasilitas perhubungan yaitu alat uji pengujian kendaraan bermotor yang merupakan kunci utama untuk memberikan pelayana prima dan sesuai standar.
- Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi.

❖ Solusi

- Segera melakukan penyesuaian akreditasi pada UPKB agar dapat beroperasional.
- Penegakan hukum dan melaksanakan operasi razia rutin bekerja sama dengan satlantas dan PM untuk menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin laik jalan.
- Menjalin korelasi dengan pihak ketiga sebagai pengguna jasa transportasi untuk melakukan uji laik kendaraan secara berkala. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh baik untuk peningkatan PAD pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus.
- Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya uji laik kendaraan secara berkala.

4.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perhubungan terus berusaha memperbaiki sistem penataan transportasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Transportasi sendiri merupakan faktor utama yang menjadi sarana penghubung untuk mendukung berkembangnya kemajuan ekonomi, sosial dan demokrasi.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2019, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Visi Misi Dinas Perhubungan dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan *Lesson Learned* bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju dan Sejahtera untuk semua. Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2019, untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disampaikan beberapa pemetaan atau rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan panduan untuk menghindari resiko dan meningkatkan kinerja dinas perhubungan, antara lain:

1) Melakukan Regulasi terhadap target serta mengoptimalisasikan pemetaaan area parkeir.
2) Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
3) Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
4) Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama;

5) Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat outcome sampai dengan level Eselon I, dan selarasantara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;
6) Meningkatkan penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
7) Agar memprioritaskan program pelayanan masyarakat
8) Efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
9) Diperlukan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kinerja yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat capaian kinerja lebih mudah dapat tercapai.
10) Memacu Pembangunan Infrastruktur perhubungan dan fasilitas pendukung lainnya untuk untuk mendukung dan menciptakan keamanan dan kenyamanan penguuna jasa transportasi.
11) Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, serta diperlukan penganggaran yang besar baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001